

Analisa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, Serta Pengaruhnya Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018)

LMS Kristiyanti¹⁾, Maya Widyana Dewi²⁾

^{1,2} Program Studi S1 Akuntansi ITB AAS Indonesia

* Email korespondensi: lms.kristiyanti@yahoo.co.id

Abstract

The study aims of this the effect of Local Taxes, Local Retributions and Balanced Funds to the Capital Expenditures on Regency and Municipal Government Central Java Province year 2016-2018. The research is a quantitative research. The subject of the research are regency and Municipal Government in Central Java Province with total 35 regencies and municipalities. Data used comes from the 2016-2018. Regional Revenue Budget Realization Report. The technique of collecting data using documentation method. The test of pre requisite analysis using classical assumption test, those are normality, multicollinearity, heteroscedasticity and auto correlation. The hypothesis test in this study used multiple linear regression analysis, t test (partial), F test (simultaneous) and coefficient of determination (R^2). The results of this research showed that partially the Regional Tax variable and the Balance Fund has a significant effect on capital expenditure. Regional levies variable does not significantly influence capital expenditure. Simultaneously, Regional Tax, Regional Retribution, and Balancing Funds have a significant effect on capital expenditure. The influence of the seth revariables on Capital Expenditures on Regency is 68.9% while there maining 31.1 % was influenced by other variables besides the variables used in this study. So it can be concluded that if the Regional Tax and Balance Fund increase, it will increase the allocation of Capital Expenditures. While Regional Retribution is not significant due to the lack of optimal excavation, management of resources owned by the government of Central Java Province to be able to increase the Original Regional Revenue.

Keywords: Balance Funds, Capital Expenditures, Local Tax, Local Retribution

Saran sitasi: Kristiyanti, L., & Dewi, M. W. (2021). Analisa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, Serta Pengaruhnya Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21 (2), 424-431. doi:<http://dx.doi.org/10.29040/jap.v21i2.1509>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v21i2.1509>

1. PENDAHULUAN

Pada tahun 1999 pemerintah melaksanakan reformasi pemerintahan daerah. Pelaksanaan reformasi tersebut diperkuat dengan diberlakukannya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa kesempatan yang sangat baik bagi Pemerintah Daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan berbagai inovasi untuk menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah daerah melalui pendapatan daerah. Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan harus menerapkan asas kemandirian daerah dengan mengoptimalkan

penerimaan dari sector Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak Daerah dan Retribusi daerah merupakan 2 komponen penyumbang PAD terbesar. Daerah dengan kondisi perekonomian yang memadai, akan memperoleh pajak yang cukup besar. Namun untuk daerah yang tertinggal, Pemerintah Daerah hanya dapat memperoleh pajak dalam jumlah yang terbatas. Begitu juga dengan retribusi daerah yang berbeda-beda setiap daerah. Pengaliran dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dapat dialokasikan dari pendapatan transfer yang berupa Dana Perimbangan untuk mendanai kebutuhan daerah.

“Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi” (UU No. 33 Tahun 2004). Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan merupakan sumber-sumber pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan untuk pengeluaran daerah. Pengeluaran yang digunakan oleh pemerintah daerah disebut belanja daerah.

Belanja daerah menurut kelompok belanja pemerintah daerah terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang bisa dianggarkan secara langsung dan terkait pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung yang terdiri dari 3 komponen belanja yaitu: a. Belanja Pegawai, b. Belanja Barang dan Jasa, dan c. Belanja Modal. Komponen belanja yang digunakan dalam penelitian ini hanya belanja modal. Belanja modal memiliki masa manfaat jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada publik. Belanja modal mendapatkan asset tetap dari Pemerintah Daerah, yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Apabila suatu daerah memiliki sarana prasarana yang memadai dapat membuat investor untuk dapat berinvestasi di daerah tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang sebagaimana diuraikan di atas, dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan terhadap Belanja Modal tahun 2016-2018, baik secara simultan maupun secara parsial. Penelitian ini menggunakan obyek pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah, karena unit pemerintahan yang dapat mengaplikasikan kebijakan anggaran untuk kepentingan rakyat di wilayah masing-masing secara langsung. Pemilihan periode 2016-2018 dimaksudkan agar penelitian ini bisa menggunakan data terbaru sehingga diharapkan hasilnya masih relevan dengan kondisi saat ini. Sebagai hipotesa atau dugaan sementara

H1: Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal;

H2: Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal

H3: Dana perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal

H4: Pajak daerah, Retribusi daerah dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *Quota Sampling* yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran dengan jumlah 35 Kabupaten/Kota, sehingga dalam 3 tahun periode terdapat 105 data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Bersumber dari statistik keuangan yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan diperoleh dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (www.djpk.kemenkue.go.id) yaitu Laporan Realisasi Anggaran APBD pada 29 Kabupaten dan 6 Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018. Variabel independen dalam penelitian ini, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan.

Metode analisis statistik dengan menggunakan software SPSS 23. Sebelum data dianalisis, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik:

a. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda perlu dilakukan terlebih dahulu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokolerasi, dan uji heteroskedastisitas.

b. Pengujian Hipotesis

1) Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan. Adapun bentuk model yang akan diuji dalam penelitian ini yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

Y = Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah
 α = Konstanta, β = Koefisien Regresi, X_1 = Pajak Daerah, X_2 = Retribusi Daerah, X_3 = Dana Perimbangan, e = error

2) Uji t (Parsial)

Uji statistik ini digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen (Pajak Daerah,Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan) terhadap variabel dependen (Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi JawaTengah Tahun 2016-2018).

3) Uji F (Simultan)

Uji statistic F bertujuan untuk menguji pengaruh semua variabel independen (PajakDaerah, RetribusiDaerah dan Dana Perimbangan) secara bersama-sama terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018) variabel dependen.

4) Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen (Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan) terhadap variabel dependen (Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

Analisis Regresi Linier Berganda

Berikut disajikan statistic deskriptif dari masing-masing variabel:

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PajakDaerah	105	25.642.922.633	1.331.817.746.450	123.160.502.233,77	193.817.531.150,153
RetribusiDaerah	105	4.211.367.980	123.215.000.000	24.197.077.953,13	18.286.600.173,829
Dana Perimbangan	105	308.008.576.635	1.941.149.973.831	1.281.643.651.594,74	350.628.421.648,899
BelanjaModal	105	14.671.794.299	1.275.359.088.966	406.298.835.813,24	194.750.594.815,438
Valid N (listwise)	105				

a. Pajak Daerah (X1)

Berdasarkan tabel 1 tentang statistic deskriptif data penelitian, jumlah populasi yang diteliti sebanyak 105 (seratus lima). Pajak Daerah mempunyai nilai minimal sebesar Rp.25.642.922.633 yang diperoleh dari Kota Salatiga tahun 2018. Nilai maksimal Pajak Daerah sebesar Rp.1.331.817.746.450 yang diperoleh dari Kota Semarang tahun 2018. Nilai rata-rata (*mean*) Pajak Daerah adalah Rp.123.160.502.233,77 atau sama dengan Rp. 123.160.502.234 sedangkan nilai standar deviasi Pajak Daerah adalah Rp. 193.817.531.150,153 atau sama dengan Rp. 193.817.531.150.

b. Retribusi Daerah (X2)

Berdasarkan tabel 1 tentang statistic deskriptif data penelitian, jumlah populasi yang diteliti sebanyak 105 (seratus lima). Retribusi Daerah mempunyai nilai minimal sebesar Rp.4.211.367.980 yang diperoleh dari Kota Salatiga tahun 2018. Nilai maksimal Retribusi Daerah sebesar Rp.123.215.000.000 yang diperoleh dari Kota Semarang Tahun 2016. Nilai rata-rata (*mean*) Retribusi Daerah adalah Rp.24.197.077.953,13

atau sama dengan Rp.24.197.077.953 sedangkan nilai standar deviasi Retribusi Daerah adalah Rp.18.286.600.173,829 atau sama dengan Rp.18.286.600.174.

c. Dana Perimbangan (X3)

Berdasarkan tabel 1 tentang statistic deskriptif data penelitian, jumlah populasi yang diteliti sebanyak 105 (seratus lima). Dana Perimbangan mempunyai nilai minimal sebesar Rp.308.008.576.635 yang diperoleh dari Kota Salatiga tahun 2018. Nilai maksimal Dana Perimbangan sebesar Rp.1.941.149.973.831 yang diperoleh dari Kabupaten Cilacap tahun 2016. Nilai rata-rata (*mean*) Dana Perimbangan sebesar Rp.1.281.643.651.594,74 atau sama dengan 1.281.643.651.595 sedangkan nilai standar deviasi sebesar Rp. 350.628.421.648,899 atau sama dengan Rp. 350.628.421.649.

d. Belanja Modal (Y)

Berdasarkan tabel 1 tentang statistic deskriptif data penelitian, jumlah populasi yang diteliti sebanyak 105 (seratus lima). Belanja Modal memiliki nilai minimal sebesar Rp.14.671.794.299 yang diperoleh dari Kota

Salatiga tahun 2018. Nilai maksimal Belanja Modal sebesar Rp.1.275.359.088.966 yang diperoleh dari Kota Semarang tahun 2017. Nilai rata-rata (*mean*) Belanja Modal sebesar Rp.406.298.835.813,24 atau sama dengan Rp 406.298.835.813 sedangkan nilai standar deviasi sebesar Rp. 194.750.594.815,438 atau sama dengan Rp. 194.750.594.815.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov Test*. Hasil pengujiannya sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas

N		105
Normal Parameters a ,b	Mean	0,00
	Std. Deviation	10700084 2436,587
Most Extreme Differences	Absolute	0,064
	Positive	0,064
	Negative	- ,038
Test Statistic		0,064
Asymp. Sig.(2-tailed)		0,200

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

Hasil uji normalitas dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) pada tabel.2 menunjukkan nilai 0,064 dengan tingkat signifikan sebesar 0,200. Karena hasil *Kolmogorov Smirnov* menunjukkan signifikansi di atas 0,05 (sebesar 0,200) maka menunjukkan data residual terdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas (independen). Uji multikolinearitas dapat dilihat dengan menggunakan uji VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. Hasil uji multikolinearitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Pajak Daerah	,331	3,019
Retribusi Daerah	,325	3,072
Dana Perimbangan	,953	1,049

- a. Dependent Variable: Belanja Modal

Tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,10 dan *Variance Inflation Factor* untuk masing- masing variabel adalah kurang dari 10 dan hal ini membuktikan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terdapat gejala multikolinearitas.

c. Uji Autokolerasi

Uji autokolerasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linier terdapat hubungan antar kesalahan pengganggu pada periode t dengant-1(sebelumnya) atau tidak. Hasil Uji Auto kolerasi adalah sebagai berikut :

Tabel 4
Hasil Uji Auto kolerasi dengan Runs Test

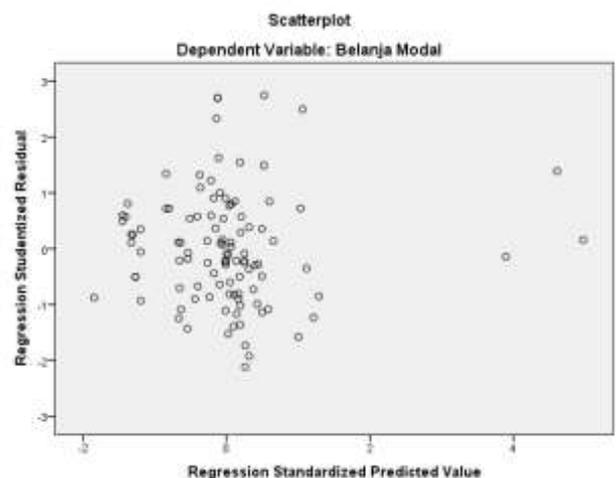
Test Value ^a	-8934843294
Cases <Test Value	52
Cases >= Test Value	53
Total Cases	105
Number of Runs	51
Z	- 0,49
Asymp. Sig.(2- tailed)	0,62

- a. Median

Berdasarkan hasil pengujian auto kolerasi nilai test diperoleh -8934843294 dengan probabilitas 0,625 tidak signifikan pada 0,05 yang berarti Ho diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual random atau tidak terjadi auto kolerasi antar nilai residual.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidak samaan varian dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain.



Gambar 1
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar1 tidak terlihat ada pola tertentu, serta titik-titiknya menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Pengujian Hipotesis

a. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk memprediksi kekuatan pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal. Berikut ini adalah tabel dari hasil pengujian:

Tabel 5
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	12890703138	41527758031
Pajak Daerah	0,673	0,095
Retribusi Daerah	-0,53	1,021
Dana Perimbangan	0,252	0,031

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Berdasarkan hasil perhitungan dalam tabel output SPSS ini maka persamaan regresinya sebagai berikut: Belanja Modal = 12.890.703.138 + 0,673 Pajak Daerah – 0,530 Retribusi Daerah + 0,252 Dana Perimbangan. Sehingga dapat diinterpretasikan:

- 1) Konstanta (nilai mutlak Y) sebesar 12.890.703.138 menyatakan jika variabel independen bernilai nol, maka Alokasi Belanja Modal tiap daerah sebesar 12.890.703.138.
- 2) Koefisien regresi Pajak Daerah sebesar 0,673 menyatakan bahwa setiap ada kenaikan pajak sebesar 1% maka akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 0,673 atau 67,3%.
- 3) Koefisien regresi Retribusi Daerah sebesar -0,530 karena jumlah negative berarti setiap ada kenaikan retribusi daerah sebesar 1% maka akan menurunkan Belanja Modal sebesar 0,530 atau 53%.
- 4) Koefisien regresi Dana Perimbangan sebesar 0,252 menyatakan bahwa setiap ada kenaikan Dana Perimbangan sebesar 1% akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 0,252 atau 25,2%.

b. Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan uji t digunakan untuk melihat pengaruh secara satu persatu

atau secara parsial. Hasil pengujian parsial dapat dilihat pada tabel 6 maka dapat disimpulkan bahwa:

Tabel 6
Uji t (Parsial)

Model	t	Sig.
(Constant)	0,310	0,757
Pajak Daerah	7,051	0,000
Retribusi Daerah	-0,519	0,605
Dana Perimbangan	8,112	0,000

a. Dependent Variable: Belanja Modal

- 1) Hasil uji t untuk H1 diperoleh hasil t- hitung sebesar 7,051 dengan signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikan untuk Pajak Daerah menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai t-hitung 7,051 > t-tabel sebesar 1,984 artinya :
H0 yang menyatakan Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal ditolak.
H1 yang menyatakan Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal diterima.
Sehingga dapat dinyatakan bahwa Pajak Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 - 2018.
- 2) Hasil uji t untuk H2 diperoleh hasil t – hitung sebesar -0,519 dengan signifikan sebesar 0,605. Nilai signifikan untuk Retribusi Daerah menunjukkan nilai di atas tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai t-hitung - 0,519 < t-tabel sebesar 1,984 artinya :
H0 yang menyatakan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal diterima.
H2 yang menyatakan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal ditolak.
Sehingga dapat dinyatakan bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2018.
- 3) Hasil uji t untuk H3 diperoleh hasil t-hitung sebesar 8,112 dengan signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikan untuk Dana Perimbangan menunjukkan nilai di bawah tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai t-hitung 8,112 > t-tabel sebesar 1,984 artinya :
H0 yang menyatakan Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal ditolak.

H3 yang menyatakan Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal diterima.

Sehingga dapat dinyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah

Kabupaten dan Kota di Provinsi JawaTengah tahun 2016 - 2018.

c. Uji F (Simultan)

Uji statistik F ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana variable lindependen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Berikut hasil uji signifikansi simultan (Uji F).

Tabel 7
Hasil Uji F (Simultan)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	2.753.775.845 .478.057.000	3	9.179.252.818 .260.189.000	77,86 1	,000 ^b
	Residual	11.907.147.49 3.424.799.000	101	1.178.925.494 .398.495.000		
	Total	39.444.905.94 8.205.367.000	104			

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), DanaPerimbangan, Pajak Daerah, Retribusi Daerah

Hasil uji statistic F pada tabel 7 diatas untuk menguji pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan dengan F-hitung sebesar 77,861 dengan nilai signifikan 0,000 hal ini berarti tingkat signifikansi < 5% ($\alpha=0,05$) dan F-hitung sebesar $r77,861 > F$ tabel sebesar 2,69 yang artinya Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis keempat (H4) dalam penelitian ini diterima.

d. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil perhitungan koefisien determinasi dapat dilihat dalam tabel 4.8 sebagai berikut

Tabel 8

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,836 ^a	0,698	0,689	108578335518,578

a. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan, Pajak Daerah, Retribusi Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Nilai koefisien determinasi yang sudah disesuaikan (*adjusted R²*) sebesar 0,689 artinya 68,9% variabel terikatnya itu belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan, serta sisanya

31,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan.

3.2. Pembahasan

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa nilai t hitung dari nilai Pajak Daerah sebesar 7,051 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05 dan nilai $t_h (7,051) > t_t (1,984)$ maka Pajak Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal.

Salah satu factor yang mempengaruhi Belanja Modal dilihat dari segi factor keuangannya itu pendapatan. Pajak Daerah merupakan bagian dari pendapatan asli daerah yang menggambarkan kemandirian suatu daerah dan mempunyai kontribusi terbesar dalam memberikan pendapatan bagi daerah. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengalokasikan pendapatannya dalam sector belanja langsung ataupun untuk belanja modal, ini berarti di Jawa Tengah dari tahun 2016-2019 mengalokasikan pajaknya untuk Belanja Modal. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, disimpulkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 sampai 2018. Semakin tinggi Pajak Daerah yang dihasilkan, maka Belanja Modal akan semakin meningkat.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Mutia, 2017) bahwa Pajak Daerah

memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh (Legrenzi & Milas, 2011) tentang pengaruh pendapatan daerah terhadap pengeluaran daerah. Hasil penelitian menyatakan bahwa pendapatan daerah terutama pajak akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah.

Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa nilai t hitung dari nilai Retribusi Daerah sebesar 0,519 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,605 dimana lebih besar dari 0,05 dan nilai t_t (-0,519) < t_t (1,984) maka Retribusi Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal. Retribusi daerah merupakan bagian dari pendapatan asli daerah, di mana dijelaskan apabila jumlah retribusi daerah mengalami peningkatan, maka belum tentu meningkatkan belanja modal. Penjelasan tersebut berarti naik turunnya Retribusi Daerah tidak mempengaruhi Belanja Modal, ini disebabkan karena banyaknya permasalahan retribusi yang sering terjadi di daerah-daerah. Aturan Pemda yang seharusnya dijalankan menjadi tidak berguna, karena para pemungut retribusi yang seharusnya menyetorkan hasil retribusi ke daerah malah digunakan secara pribadi. Sehingga hasil retribusi yang diperoleh tidak sesuai dengan anggaran sehingga mempengaruhi perolehan Pendapatan Asli Daerah.

Hasil penelitian Retribusi Daerah ini tidak signifikan terhadap Belanja Modal hal ini berarti kurang optimalnya penggalan, pengelolaan sumber daya yang dimiliki pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan hasil retribusi daerah sehingga dapat berdampak baik terhadap Belanja Modal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati, 2018) bahwa Retribusi Daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Sulistiyowati, 2011) menyatakan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sehingga apabila terjadi kenaikan pada Retribusi Daerah, maka akan meningkatkan Belanja Modal.

Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa nilai t hitung dari nilai Dana Perimbangan sebesar 8,112 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai t_t (8,112) > t_t (1,984) maka Dana Perimbangan berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal.

Dana Perimbangan merupakan salah satu factor yang mempengaruhi belanja modal dari segi factor keuangannya itu pendapatan yang berasal dari dana transfer pemerintah pusat. Dana Perimbangan diberikan untuk mengatasi kesenjangan pendanaan yang terjadi antar daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh disimpulkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 sampai dengan 2018. Semakin tinggi Dana Perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah maka pengeluaran pemerintah daerah khususnya Belanja Modal juga akan meningkat. Sebaliknya, semakin rendah Dana Perimbangan yang diterima pemerintah daerah maka pengeluaran pemerintah daerah khususnya Belanja Modal yang dikeluarkan juga akan rendah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Bungkeset al., 2016) bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Aceh pada Periode 2009 - 2013. Menjelaskan semakin besar Dana Perimbangan dengan jumlah penduduknya, maka semakin besar untuk Belanja Modal digunakan di Kabupaten/Kota. Hal ini tidak didukung oleh penelitian dari (Sarietal., 2017) bahwa Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di wilayah Bodetabek periode 2006 - 2015.

Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian diketahui secara simultan terdapat pengaruh variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal, ini dibuktikan dengan hasil $F_{hitung} = 77,861 > F_{tabel} = 2,69$ dan nilai signifikansinya 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hasil pengujian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Intani, 2018) bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal secara simultan.

Nilai koefisien determinasi diketahui sebesar 68,9% yang menunjukkan bahwa variabel Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan. Sedangkan sisanya 31,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Pembahasan di atas dapat menjelaskan bahwa dari pengaruh yang simultan presentase pengaruhnya adalah 68,9% dan sisanya 31,1% dipengaruhi oleh faktor lain. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Intani (2018) bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 57,6%, sedangkan sisanya yaitu 42,4 dipengaruhi faktor lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

Secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini dikarenakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan merupakan faktor yang mempengaruhi Belanja Modal dilihat dari segi faktor keuangan yaitu pendapatan. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan merupakan bagian yang menjadi sumber pendapatan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri dan berasal dari pemerintah pusat. Namun dalam penelitian ini variabel Retribusi Daerah secara parsial tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini dikarenakan Retribusi Daerah kurang mengoptimalkan penggalan, pengelolaan sumber daya yang dimiliki pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 - 2018. Hal ini menjelaskan jika Pajak Daerah meningkat maka akan meningkatkan pengalokasian terhadap Belanja Modal.
- b. Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2018, dikarenakan kurang optimalnya penggalan, pengelolaan sumberdaya yang dimiliki pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya.
- c. Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah

Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 - 2018. Hal ini menjelaskan jika Dana Perimbangan meningkat maka akan meningkatkan pengalokasian terhadap Belanja Modal.

- d. Secara simultan variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian Belanja Modal. Presentase pengaruh simultan sebesar 68,9% dan sisanya 31,1% dipengaruhi oleh faktor lain.

5. REFERENSI

- Bungkes, P., Nadirsyah, & Abdullah, S. (2016). Pengaruh Dana Perimbangan, pendapatan Sendiri dan Penerimaan Pembiayaan Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintahan Kabupaten/ Kota di Aceh). *Magister Akuntansi*, 5 (August), 11.
- Intani, R. (2018). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016. *Jurnal Ekonomi*, 53 (9), 1689 – 1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Legrenzi, G., & Milas, C. (2011). *Debt Sustainability and Financial Crises : Evidence from the GIIPS Debt Sustainability and Financial Crises : Evidence from the GIIPS Gabriella Legrenzi Costas Milas. September.*
- Mutia. (2017). *Pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara.* Universitas Sumatera Utara.
- Rahmawati, R. (2018). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap belanja modal di D.I Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 26 (2), 195–209.
- Sari, N., Gustian, D., & Sarwani. (2017). Pengaruh Dana Perimbangan, Dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal dan Dampaknya pada Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Bodetabek Periode 2006 s/d 2015. *Pascasarjana Universitas Pamulang*, 491–506.
- Sulistyowati, D. (2011). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DAK Terhadap Alokasi Belanja Modal.* Universitas Diponegoro.